



DISPARITAS KEUANGAN DAERAH DI PULAU JAWA DAN SUMATERA



Skripsi Oleh:

WENDA INDRIYANI

01021281722085

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**DISPARITAS KEUANGAN DAERAH DI PULAU JAWA DAN
SUMATERA**

Disusun Oleh :

Nama : Wenda Indriyani
NIM : 01021281722085
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Tanggal
: 30 Juni 2022

Dosen Pembimbing



Ketua: Dr. Azwardi, M.Si
NIP. 196805181993031003



Tanggal
: 1 September 2022

Anggota: Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
DISPARITAS KEUANGAN DAERAH DI PULAU JAWA DAN
SUMATERA

Disusun oleh:

Nama : Wenda Indriyani
NIM : 01021281722085
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 08 November 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, Desember 2022

Ketua



Dr. H. Azwardi, M.Si
NIP. 196805181993031003

Anggota



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

Anggota



Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI
18-1-2027
JUR. EK. PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNSRI


Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wenda Indriyani

NIM : 01021281722085

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:

Disparitas Keuangan Daerah di Pulau Jawa dan Sumatera

Pembimbing:

Ketua : Dr. H. Azwardi, M.Si

Anggota : Feny Marissa, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 08 November 2022

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam Skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjana.

Indralaya, Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Wenda Indriyani
NIM. 01021281722085

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN
18-1-2027
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi yang dibuat peneliti berjudul "Disparitas Keuangan Daerah di Pulau Jawa dan Sumatera". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan dan penelitian skripsi ini tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Akan tetapi berkat bantuan, bimbingan dan saran yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Palembang, 08 November 2022



Wenda Indriyani
NIM. 01021281722085

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari berbagai kendala yang dialami. Kendala tersebut dapat terselesaikan berkat bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar pendidikan Strata Satu (S1).
2. Bapak Dr. H. Azwardi, M.Si dan Ibu Feny Marissa, S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mukhlis, S.E, M.Si selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan Bapak Dr. Sukanto, S.E, M.Si selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Hj. Dr. Anna Yulianita S.E, M.Si, selaku dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan terkhusus almarhumah Ibu serta adik perempuanku, atas segala kasih sayang, doa, nasehat dan dukungan yang tak henti-hentinya selama masa perkuliahan sampai dengan proses penyelesaian skripsi ini.

Palembang, 08 November 2022



Wenda Indriyani
NIM. 01021281722085

ABSTRAK

DISPARITAS KEUANGAN DAERAH DI PULAU JAWA DAN SUMATERA

Oleh:

Wenda Indriyani; Azwardi; Feny Marissa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar disparitas keuangan daerah di Pulau Jawa dan Sumatera, serta menganalisis pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap disparitas keuangan daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data *time series* dari tahun 2010-2021, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode dalam penelitian ini menggunakan perhitungan Indeks Williamson dan Regresi Linear Berganda (*Ordinary Least Square*). Hasil perhitungan Indeks Williamson menunjukkan disparitas keuangan daerah di Pulau Jawa masih tinggi, sedangkan pada Pulau Sumatera menunjukkan disparitas sedang. Sementara hasil regresi linear berganda pada Pulau Jawa menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh negatif signifikan, sedangkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap disparitas keuangan daerah. Adapun hasil regresi linear berganda pada Pulau Sumatera menunjukkan variabel jumlah penduduk yang bekerja tidak berpengaruh, sedangkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap disparitas keuangan daerah.

Kata Kunci: *Disparitas Keuangan Daerah, Jumlah Penduduk yang Bekerja, Dana Alokasi Umum (DAU), Indeks Williamson*

Ketua

Dr. H. Azwardi, M.Si
NIP. 196805181993031003

Anggota

Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

ABSTRACT

REGIONAL FINANCIAL DISPARITIES IN JAVA AND SUMATRA

By:

Wenda Indriyani; Azwardi; Feny Marissa

This study aims to determine the degree of regional financial disparities in Java and Sumatra, and analyze the effect of the employment and the block grant on regional financial disparities in Java and Sumatra. The secondary data used in this study is time series data from 2010 to 2021, obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The methods in this study used the calculation of the Williamson Index and multiple linear regression (Ordinary Least Square). The results of the Williamson Index calculation showed that regional financial disparities in Java were still high, although Sumatra showed moderate disparities. Meanwhile the results of multiple linear regression in Java and the employment variable revealed a significantly negative effect, in addition the block grant variable has no effect on regional financial disparities. As a result of multiple linear regression in Sumatra, the variable identified as the employment variable has no effect, moreover the block grant variable also showed a significantly negative effect on regional financial disparities.

Keywords: *Regional Financial Disparities, Employment, Block Grant, Williamson Index*

First Advisor



Dr. H. Azwardi, M.Si
NIP. 196805181993031003

Member



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP.199004072018032001

Acknowledge by,
Head Of Development Economics Department



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa	:	Wenda Indriyani	
NIM	:	01021281722085	
Jenis Kelamin	:	Perempuan	
Tempat/Tanggal Lahir	:	Palembang/13 Oktober 1999	
Agama	:	Islam	
Alamat Rumah	:	Jalan Wahid Ali No.83 Rt/Rw: 033/013 Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang	
Status	:	Belum Menikah	
Tinggi	:	161cm	
Berat Badan	:	45 kg	
Alamat Email	:	wenda.indriyani13@gmail.com	

Pendidikan Formal

SD : SD Negeri 49 Palembang

SMP : SMP Negeri 8 Palembang

SMA : SMA Negeri 5 Palembang

S1 : Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Akademis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori & Konseptual	11
2.1.1 Teori Transfer	11
2.1.1.1 Transfer Bersyarat (<i>Conditional Grants</i>)	12
2.1.1.2 Transfer Tanpa Bersyarat (<i>Unconditional Grants</i>)	19
2.1.2 Konsep Ketimpangan	22
2.1.2.1 Definisi Ketimpangan Fiskal (<i>Fiscal Imbalance</i>)	22
2.1.2.2 Hipotesis Neo-Klasik	24
2.1.2.3 Hipotesis Kuznet (Kurva U-Terbalik)	26
2.1.2.4 Kurva Lorenz	27
2.1.3 Konsep Keuangan Daerah	28
2.1.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30
2.1.3.2 Dana Perimbangan	30
2.1.4 Hubungan Jumlah Penduduk yang Bekerja Dengan Ketimpangan Fiskal	34
2.1.5 Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) Dengan Ketimpangan Fiskal	37
2.2 Penelitian Terdahulu	38
2.3 Kerangka Pikir	45
2.4 Hipotesis	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	48

3.2	Jenis dan Sumber Data	48
3.3	Teknik Analisis	49
3.3.1	Analisis Ketimpangan Indeks Williamson	49
3.3.2	Regresi Linear Berganda (OLS)	50
3.3.3	Uji Asumsi Klasik	52
3.3.4	Pengujian Hipotesis	55
3.3.4.1	Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)	55
3.3.4.2	Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t-statistik)	56
3.3.4.3	Koefisien Determinasi (R^2)	57
3.4	Definisi Operasional Variabel Penelitian	58
3.4.1	Variabel Dependen	58
3.4.2	Variabel Independen	58
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1	Gambaran Umum	60
4.1.1	Gambaran Umum Pulau Jawa	60
4.1.2	Gambaran Umum Pulau Sumatera	61
4.1.3	Deskripsi Penelitian	62
4.1.3.1	Perkembangan Jumlah Penduduk di Pulau Jawa dan Sumatera	63
4.1.3.2	Perkembangan Dana Alokasi Umum di Pulau Jawa dan Sumatera	66
4.2	Hasil Penelitian.....	69

4.2.1 Hasil Perhitungan Indeks Williamson di Pulau Jawa dan Sumatera	69
4.2.2 Uji Asumsi Klasik Pulau Jawa	72
4.2.2.1 Uji Normalitas	73
4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas	74
4.2.2.3 Uji Multikolinieritas.....	74
4.2.2.4 Uji Autokorelasi	75
4.2.3 Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda di Pulau Jawa	77
4.2.3.1 Uji Hipotesis Seacara Simultan (Uji F)	77
4.2.3.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t-statistik)	77
4.2.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)	79
4.2.4 Uji Asumsi Klasik Pulau Sumatera	79
4.2.4.1 Uji Normalitas	79
4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas	80
4.2.4.3 Uji Multikolinieritas.....	81
4.2.4.4 Uji Autokorelasi	82
4.2.5 Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda di Pulau Sumatera.....	82
4.2.5.1 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)	84
4.2.5.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t-statistik)	85
4.2.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)	86
4.3 Pembahasan	87

4.3.1 Disparitas Keuangan Daerah di Pulau Jawa dan Sumatera (Indeks Williamson)	87
4.3.2 Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja terhadap Disparitas Keuangan Daerah di Pulau Jawa.....	91
4.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Disparitas Keuangan di Pulau Jawa	94
4.3.4 Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja terhadap Disparitas Keuangan Daerah di Pulau Sumatera.....	97
4.3.5 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Disparitas Keuangan di Pulau Sumatera	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Penerimaan di Pulau Jawa (Ribu Rupiah)	4
Tabel 1.2 Total Penerimaan di Pulau Sumatera (Ribu Rupiah)	5
Tabel 4.1 Indeks Williamson Pulau Jawa dan Sumatera	70
Tabel 4.2 Uji Heteroskedastisitas Pulau Jawa	73
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas Pulau Jawa	74
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi Pulau Jawa.....	75
Tabel 4.5 Interpretasi Hasil Estimasi Pulau Jawa.....	76
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas Pulau Sumatera	81
Tabel 4.7 Uji Multikolinieritas Pulau Sumatera.....	81
Tabel 4.8 Uji Autokorelasi Pulau Sumatera	82
Tabel 4.9 Interpretasi Hasil Estimasi Pulau Sumatera	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva <i>Matching Grant</i>	14
Gambar 2.2 Kurva <i>Matching Close Ended Grant</i>	16
Gambar 2.3 Kurva <i>Nonmatching Grant</i>	18
Gambar 2.4 Kurva Ketimpangan Wilayah (Hipotesis Neo-Klasik)	25
Gambar 2.5 Kurva Kuznets (Kurva U- Terbalik)	27
Gambar 2.6 Kurva Lorenz	28
Gambar 2.7 Kerangka Pikir	46
Gambar 4.1 Peta Pulau Jawa	61
Gambar 4.2 Peta Pulau Sumatera	62
Gambar 4.3 Perkembangan Jumlah Penduduk yang Bekerja di Pulau Jawa	63
Gambar 4.4 Perkembangan Jumlah Penduduk yang Bekerja di Pulau Sumatera	64
Gambar 4.5 Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) di Pulau Jawa	67
Gambar 4.6 Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) di Pulau Sumatera.....	68
Gambar 4.7 Uji Normalitas Pulau Jawa.....	72
Gambar 4.8 Uji Normalitas Pulau Sumatera.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Total Penerimaan Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2010-2021 (Rupiah)	114
Lampiran 2. Jumlah Penduduk Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2010-2021 (Jiwa)	114
Lampiran 3. Dana Alokasi Umum (DAU) Pulau Jawa dan Sumatera 2010-2021 (Rupiah)	115
Lampiran 4. Jumlah Penduduk yang Bekerja Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2010-2021 (Jiwa)	115
Lampiran 5. Hasil Perhitungan Indeks Williamson Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2010-2021	116
Lampiran 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda (<i>Ordinary Least Square</i>) Pulau Jawa	116
Lampiran 7. Uji Normalitas Pulau Jawa	117
Lampiran 8. Uji Heteroskedastisitas Pulau Jawa	117
Lampiran 9. Uji Autokorelasi Pulau Jawa	118
Lampiran 10. Uji Multikolinieritas Pulau Jawa	118
Lampiran 11. Hasil Uji Regresi Linear Beganda (<i>Ordinary Least Square</i>) Pulau Sumatera	119
Lampiran 12. Uji Normalitas Pulau Sumatera	119
Lampiran 13. Uji Heteroskedastisitas Pulau Sumatera	120
Lampiran 14. Uji Autokorelasi Pulau Sumatera	121
Lampiran 15. Uji Multikolinieritas Pulau Sumatera	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan ekonomi di Indonesia, pada awalnya menggunakan pandangan dari efek *trickle down* yang diungkapkan oleh Hirschman pada tahun 1950-an. Pandangan dari efek *trickle down* ini mengungkapkan, bahwa pembangunan ekonomi yang berpusat di suatu wilayah atau daerah tertentu dapat memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi di wilayah lainnya. Efek *trickle down* ini banyak dipraktikkan oleh negara-negara berkembang, salah satunya negara Indonesia. Hal ini menginterpretasikan bahwa pembangunan yang dipusatkan pada pusat pemerintahan diharapkan dapat memberikan efek yang baik pada kegiatan perekonomian wilayah atau daerah sekitarnya dan mengurai terjadinya ketimpangan (Julio *et al.*, 2019).

Pusat pembangunan di Indonesia pada mulanya hanya berfokus pada wilayah Pulau Jawa dengan mengadopsi pandangan dari efek *trickle down*, hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan perekonomian yang mengalir dan tumbuh pada pulau atau wilayah lainnya. Akan tetapi pada kenyataannya, perekonomian pulau lain belum kunjung mengalami pergerakan yang signifikan sesuai yang

diharapkan oleh pemerintah, ketimpangan masih terjadi dan semakin membesar. Pada akhirnya untuk mengatasi masalah ketimpangan tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan kepada masing-masing daerah di Indonesia dengan menetapkan otonomi daerah. Otonomi daerah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999.

Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya sendiri dan menghimpun sumber-sumber yang potensial dalam proses pembangunan di daerahnya, sehingga tidak menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat. Menurut Rahmadi (2011), otonomi daerah ingin mencapai beberapa tujuan, yaitu memberikan peningkatan kualitas serta kuantitas dari pelayanan publik, meningkatkan laju kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pokok otonomi daerah selaras dengan pelaksanaan pembangunan, yaitu salah satunya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas atau ketimpangan di suatu daerah.

Sejalan dengan adanya otonomi daerah, terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan perekonomian termasuk menyusun program pembangunan di daerah yang dilimpahkan dari pusat kepada daerah otonom. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sama halnya dengan otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dari segi fiskal (Christia & Ispriyarsa, 2019).

Keuangan daerah memegang peranan yang penting dalam proses pembangunan ekonomi dan harus diperbaiki serta ditingkatkan. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan inilah yang diharapkan mampu digunakan untuk menggali dan memanfaatkan berbagai potensi sumber keuangan. Ketersediaan keuangan sebagai sumber pembiayaan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan permasalahan ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Kebijakan desentralisasi fiskal berperan dalam mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah (Arafia & Firman, 2011).

Pulau Jawa dan Sumatera merupakan penyumbang pertumbuhan perekonomian terbesar, apabila dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 58,75 persen dan pertumbuhan ekonomi pada Pulau Sumatera sebesar 21,39 persen, keadaan ini menunjukkan bahwa kedua pulau tersebut memiliki keunggulan dan kualitas yang sudah cukup baik (Statistik, 2020). Pulau Jawa dan Sumatera terus berupaya memperbaiki keuangan daerahnya dan menggali sumber-sumber keuangan yang potensial guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang maksimal, serta dapat mengejar laju percepatan pembangunan ekonomi, sehingga dapat terhindar dari masalah ketimpangan atau kesenjangan khususnya dari sisi fiskal. Keadaan keuangan di Pulau Jawa dan Sumatera dapat dilihat dari sisi penerimaan daerah, yang tertuang dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Tabel 1.1 Total Penerimaan di Pulau Jawa (Rupiah)

No	Nama Provinsi	2017	2018	2019
1	DKI Jakarta	73.535.704.732	78.671.227.891	74.077.190.725
2	Jawa Barat	35.512.081.597	36.482.714.855	39.199.187.033
3	Jawa Tengah	24.349.750.271	26.231.235.039	27.490.556.740
4	DI Yogyakarta	5.279.617.119	5.790.570.834	6.173.815.388
5	Jawa Timur	31.851.419.352	35.289.761.233	38.411.057.610
6	Banten	10.265.222.255	11.072.775.454	12.281.829.272
	Pulau Jawa	180.793.795.326	193.538.285.306	197.633.636.768

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah 2022

Tabel 1.1 menunjukkan APBD dari sisi penerimaan selama periode tahun 2017-2019 di Pulau Jawa mengalami peningkatan yang signifikan. Total penerimaan tertinggi pada Pulau Jawa yaitu sebesar Rp. 197.633.636.768 terjadi pada tahun 2019. Penyumbang penerimaan total terbesar untuk Pulau Jawa masih didominasi oleh provinsi-provinsi besar yaitu, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Total penerimaan terbesar pada Pulau Jawa diperoleh dari Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Indonesia, karena pada dasarnya kegiatan perekonomian yang berpusat pada Provinsi DKI Jakarta menyebabkan penerimaan per tahun pada provinsi ini besar.

Total penerimaan pada Pulau Sumatera yang terlihat pada Tabel 1.2, mengalami peningkatan yang cukup baik pada setiap tahunnya, yaitu dengan total penerimaan tertinggi sebesar Rp. 81.366.014.897 dicapai pada tahun 2019

dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu, tahun 2017 dan 2018. Pada Pulau Sumatera provinsi dengan pencapaian tertinggi dengan total penerimaan sebesar Rp. 18.709.339.756 diperoleh oleh Provinsi Aceh.

Tabel 1.2 Total Penerimaan di Pulau Sumatera (Rupiah)

No.	Nama Provinsi	2017	2018	2019
1	Aceh	14.813.722.417	15.335.355.058	18.709.339.756
2	Sumatera Utara	13.402.544.408	13.544.555.111	14.060.766.196
3	Sumatera Barat	6.363.961.132	6.822.711.714	6.954.111.878
4	Riau	9.247.194.354	8.537.822.915	8.771.607.066
5	Kepulauan Riau	3.525.102.410	3.499.838.267	4.046.212.153
6	Jambi	4.583.486.208	4.869.536.536	5.244.689.781
7	Bengkulu	3.243.391.495	3.202.896.451	3.147.376.155
8	Sumatera Selatan	8.260.827.598	9.182.300.411	9.953.600.860
9	Lampung	7.017.854.660	7.633.025.849	7.481.834.728
10	Kep. Bangka Belitung	2.468.716.679	2.666.616.227	2.996.476.324
	Pulau Sumatera	72.926.801.361	75.294.658.539	81.366.014.897

Sumber:Badan Pusat Statistik, data diolah 2022

Berdasarkan penjelasan dari Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 menunjukkan fenomena bahwa kondisi keuangan daerah yang tertuang dalam APBD pada sisi penerimaan periode tahun 2017-2019 di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera cukup baik, karena mengalami peningkatan setiap tahun. Kedua pulau menunjukkan beberapa provinsi yang mendapatkan penerimaan yang lebih kecil dibandingkan provinsi lainnya, mengindikasikan bahwa total penerimaan di Pulau Jawa dan Sumatera masih tidak merata walaupun kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sudah berjalan cukup lama. Perbedaan keberadaan sumber dan potensi pada masing-masing daerah menjadikan penerimaan yang diperoleh suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki perbedaan yang mencolok (Rohima, 2009).

Pemerintah pusat serta pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera terus berupaya dalam menggali potensi-potensi sumber daya keuangannya sehingga tidak memunculkan permasalahan disparitas atau ketimpangan. Ketidakmampuan yang dimiliki oleh beberapa daerah akan menyebabkan tingkat pencapaian penerimaan yang berbeda pula. Ketidakmampuan tersebut yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya disparitas atau ketimpangan antar daerah dalam mengelola serta memungut sumber penerimaan mereka (Rahmadi, 2011).

Fiscal imbalance atau ketidakseimbangan fiskal merupakan fenomena yang terjadi ketika tidak ada keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketimpangan atau disparitas fiskal terbagi menjadi dua jenis, yaitu ketimpangan fiskal vertikal (*Vertical Fiscal Imbalance*) dan ketimpangan fiskal horizontal (*Horizontal Fiscal Imbalance*) (Dahlby, 2005). Ketika tidak adanya keseimbangan antara pendapatan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat terhadap pemerintahan yang lebih rendah, yaitu pemerintah daerah disebut dengan ketimpangan fiskal vertikal. Sedangkan perbedaan kemampuan keuangan yang terjadi pada tingkat pemerintahan yang sama atau antar pemerintah daerah disebut sebagai ketimpangan fiskal horizontal (Putro, 2016).

Disparitas atau ketimpangan merupakan hal umum yang sering terjadi, khususnya di Indonesia. Ketimpangan dapat terjadi karena setiap daerah memiliki perbedaan potensi. Pulau Jawa dan Pulau Sumatera merupakan pulau dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan penyumbang perekonomian yang sudah cukup baik di Indonesia. Walaupun demikian, hal tersebut tidaklah menjamin

kedua pulau bebas dari masalah disparitas keuangan, hal tersebut menarik minat peneliti untuk memilih Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Berdasarkan penelitian Sriyana (2011), Pujawati *et al.*, (2019), dan penelitian yang dilakukan oleh Boadway & Tremblay (2010), hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja atau tenaga kerja dapat mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dengan peningkatan pajak yang dapat mengurangi transfer dari pusat ke daerah. Jumlah penduduk pada dasarnya berkaitan erat dengan proses perekonomian dan pembangunan, pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi akan berpengaruh pada ruang lingkup ekonomi.

Jumlah penduduk pada sisi penerimaan akan mengakibatkan berbagai kemungkinan, yang pertama ketika struktur jumlah penduduk yang tidak produktif di suatu negara bertambah maka penerimaan di suatu negara juga akan cenderung menurun. Penurunan struktur jumlah penduduk yang bekerja (*labor force*) akan berakibat pada penurunan tingkat tabungan masyarakat dan mengakibatkan terjadinya peningkatan rasio ketergantungan pada pemerintah.

Penurunan *labor force* (penduduk yang bekerja) akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, yang berpengaruh terhadap penurunan *tax base* (dasar pengenaan pajak) dan pada akhirnya penerimaan pajak mengalami penurunan. Keadaan sebaliknya terjadi ketika, struktur jumlah penduduk produktif mengalami peningkatan, dapat menyebabkan potensi peningkatan penerimaan pajak yang akan mengakibatkan peningkatan penerimaan daerah. Hal tersebut dapat menunjukkan jika suatu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang

banyak dan semua penduduknya produktif dibandingkan dengan daerah lain, dimana jumlah penduduknya lebih banyak namun tidak produktif maka dapat memunculkan masalah disparitas atau ketimpangan (Sriyana, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Rohima (2009), Suyanto (2017), Sriningsih & Yasin (2009), dan Herdiyana (2019), menyatakan bahwa permasalahan ketimpangan keuangan antar daerah dapat diatasi dengan pemberian dana transfer dari pemerintah pusat, yaitu pemberian Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum diperlukan sebagai upaya dalam pemerataan disparitas antar daerah sekaligus berpengaruh kuat dalam mengurangi disparitas keuangan antar daerah.

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan dari latar belakang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa disparitas keuangan daerah terkhusus pada Pulau Jawa dan Pulau Sumatera masih saja terjadi, dan dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang bekerja serta dana transfer dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Penting dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana disparitas keuangan daerah yang terjadi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera serta menganalisis bagaimana pengaruh dari jumlah penduduk yang bekerja dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap disparitas keuangan daerah di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana disparitas keuangan daerah di Pulau Jawa dan Sumatera?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap disparitas keuangan daerah di Pulau Jawa dan Sumatera?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui seberapa besar disparitas keuangan daerah di Pulau Jawa dan Sumatera.
2. Menganalisis pengaruh dari jumlah penduduk yang bekerja dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap disparitas keuangan daerah di Pulau Jawa dan Sumatera.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca, serta diharapkan juga dapat menjadi bahan kajian, informasi dan refrensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan konsentrasi keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera dalam memahami bagaimana permasalahan disparitas atau ketimpangan yang terjadi khususnya dari segi

keuangan atau fiskal, sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- 2004, U. N. 3. tahun. (2004). *Undang-undang (UU) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah No.33 Tahun 2004.* 82, 1–21.
- Agusalim, L. (2016). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Desentralisasi. *KINERJA*, 20(1), 53–68.
- Aidar, N., & Syahputra, R. (2015). Analisis Disparitas Pendapatan Regional di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 2(1), 56–68.
- Amriadi, & Umar, A. (2020). Analisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan Di Kabupaten Soppeng Tahun 2008-2018. *Balance: Jurnal Ekonomi*, 16(2), 126–133.
- Andhiani, K. D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 26–34.
- Arafia, D., & Firman, T. (2011). *Dampak Dana Perimbangan Pada Era Desentralisasi Terhadap Kesenjangan Antar Wilayah Di Indonesia*. 1, 1–10.
- Asy'ari, F. R., Nirwanto, N., & Siswati, A. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pajak Daerah Kota Malang. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(1), 1–13.
- Azwardi, & Abukosim. (2007). Pengelolaan Keuangan Pedesaan Dalam Mendorong Pembangunan Wilayah Pedesaan: Suatu Tinjauan Teoritis. *Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 127–134.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik keuangan Pemerintah Provinsi 2011-2022*. www.bps.go.id
- Bird, M. R., & Tarasov, V. A. (2004). *Closing The Gap : Fiscal Imbalances and Intergovernmental Transfers in Developed Federations.* 22, 77–102. <https://doi.org/10.1068/c0328>

- Bird, R. M., & Smart, M. (2002). *Intergovernmental Fiscal Transfers : International Lessons for Developing Countries*. 30(6), 899–912.
- Broadway, R., & Shah, A. (2007). *Intergovernmental Fiscal Transfers*. The World Bank.
- Broadway, R., & Tremblay, J. F. (2010). Mobility and Fiscal Imbalance. *National Tax Journal*, 63(4), 1023–1054. <https://doi.org/10.17310/ntj.2010.4s.09>
- Chakunda, V., Dzingirai, C., & Chikerema, A. (2021). Modelling Intergovernmental Fiscal Equalisation in Zimbabwe: Towards Resolving Vertical and Horizontal Fiscal Imbalance. *Public Finance Quarterly*, 4, 535–550.
- Christia, A. M., & Ispriyarno, B. (2019). *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia*. 15(1).
- Dahlby, B. (2005). Dealing With The Fiscal Imbalances: Vertical, Horizontal, and Structural. In *C.D. Howe Institute Working Paper* (Issue September). http://www.cdhowe.org/pdf/workingpaper_3.pdf
- Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng Bali. (2019). *Masalah Tenaga kerja dan Angkatan Kerja Di indonesia*. <https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/masalah-tenaga-kerja-dan-angkatan-kerja-di-indonesia-56>
- Firmansyah, M. F. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dalam Penentuan Basis Ekonomi, Isu Ketimpangan dan Lingkungan di Jawa Barat Periode 2010-2019. *Jambure Economic Education*, 3(1), 8–27.
- Fretes, P. N. de. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 2(2), 2005–2025.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (5th ed.). Salemba Empat.
- Hadju, I. I., Masinambow, V. A. ., & Maramis, M. T. . (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(01), 110–120.

- Harahap, F. S., Erlina, & Rujiman. (2020). Analisis Determinan Disparitas Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. *Serambi Engineering*, V(2), 985–994.
- Harefa, M. (2018). Hubungan Dana Bagi Hasil Dengan Penerimaan Daerah dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur (Relationship of Revenue Sharing with Regional Revenue and Poverty in East Kalimantan Province). *Ekonomi & Kebijakan Publik*, 9(2), 147–160.
- Hasanur, D., & Putra, Z. (2017). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kabupaten / Kota Kawasan Barat Selatan Aceh). *E-Kombis*, III(23), 46–59.
- Hendarmin. (2019). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Modal Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(2), 245–271. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i2.11186>
- Herdiyana, D. (2019). Hubungan Realisasi Transfer DAU Dan DAK Terhadap Kesenjangan Horizontal Di Indonesia Study Terhadap 33 Provinsi Periode TA 2009-2013. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 7(2).
- Indonesia, B. P. S. (2021). *Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berhenti Bekerja Setahun Terakhir (2016-2020)*. www.bps.go.id
- Indonesia, R. of. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. <http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu022.pdf>
- Indradeta. (2022). *Peta Pulau Sumatera Lengkap dengan Keterangan Provinsi*. Portal Tataruang. <https://www.tataruang.id/2022/04/01/peta-pulau-sumatera-lengkap-dengan-provinsi/>
- Indradetra. (2022). *Profil Beserta Gambar Peta Pulau Jawa Lengkap*. Portal Tataruang. <https://www.tataruang.id/2022/03/26/profil-beserta-gambar-peta-pulau-jawa-lengkap/>
- Iskandar, I. (2012). Flypaper Effect Pada Unconditional Grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(1), 113. <https://doi.org/10.23917/jep.v13i1.186>

- Ivana, D., Hardiwinoto, & Nurcahyono, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen Dan Bisnis*, 4(10), 111–119.
- Jia, J., Liu, Y., Martinez-Vazquez, J., & Zhang, K. (2020). Vertical Fiscal Imbalance and Local Fiscal Indiscipline: Empirical Evidence From China. *European Journal of Political Economy*, 101992. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101992>
- Julio, Marwoto, P. B., & Manulang, R. R. (2019). Analisis Disparitas Perekonomian Antar Pulau Besar di Indonesia 2013-2017. *Jurnal Progresif Manajemen Bisnis (JPMB)*, 6(2), 1–11.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(3), 1255–1281.
- Kementerian Keuangan RI. (2017). *Sebaran Dana Alokasi Umum 2017*. www.kemenkeu.go.id
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2021). *Angkatan Kerja Produktif Melimpah*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/33004/angkatan-kerja-produktif-melimpah/0/artikel>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020). *Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan Dengan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pulau Sumatera* (A. Handayani & M. L. Nababan (eds.)). ayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan Dengan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pulau Jawa* (A. Handayani & M. L. Nababan (eds.)). Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Keuangan, Kementerian. (2012). *Reformulasi DAU Untuk Memperkuat Peran Sebagai Equalization Grant*. xiii+60.

https://sipakaril.ipb.ac.id/Files/7fdc63e4-f494-4b34-b560-943bd4103e0c/paper_7fdc63e4-f494-4b34-b560-943bd4103e0c.pdf

- Korimah, I., & Aisyah Fitri Yuniasih. (2019). *Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Antarkabupaten/Kota di Sulawesi Selatan: Implementasi Tujuan SDG's Ke-10.* 1–10.
- Kurniasih, E. P. (2015). Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznet. *Jurnal Eksos*, 9(1), 36–48.
- Kustianingsih, N., Muslimin, & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6), 82–91.
- Manshur, A. (2020). Reviewing Specific Grant in 2015-2019 Period: Consistency and Quality Matters. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 4(3), 270–285. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i3.122>
- Martinez-vazquez, J., & Boex, J. (2014). The Design Of Equalization Grants : Theory and Applications. *Georgia State University, October*.
- Meliza, & Murtala. (2020). Analisis Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(April), 27–38.
- Mopangga, H. (2011). Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Trikonomika*, 10(1), 40–51.
- Musgrave, A. R., & Musgrave, B. P. (1989). *Public Finance In Theory And Practice* (D. Sc. Stratford (ed.)). Library of Congress Cataloging in Publication Data.
- Oktaviani, W., Zulgani, & Rosmeli. (2017). Pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi. *Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 6(3), 105–112.
- Permana, R. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 111–129.

- Prastiwi, D. H., Laut, L. T., & Destiningsih, R. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2014-2018. *DINAMIC : Directory Journal of Economic*, 2(1), 33–50.
- Pujawati, Hailuddin, B., & Agustiani, E. (2019). Disparitas antara Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 24–36.
- Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, kemenkeu R. (2018). *Kajian Peningkatan Efektivitas Peranan DAU Dalam Pemerataan Kemampuan Keuangan Antar Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2018/07/02/130043146906279-kajian-peningkatan-efektivitas-peranan-dau-dalam-pemerataan-kemampuan-keuangan-antar-daerah>
- Putro, R. P. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran Di Wilayah Sumatera. *Indonesian Treasury Review*, 1, 85–100.
- Rahmadi, S. (2011). Disparitas Keuangan Daerah Kabupaten/kota Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(3), 68–87.
- Rohima, S. (2009). *Analisis Ketimpangan Fiskal Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan*.
- Rosa, Y. Del, & Sovita, I. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa. *Menara Ekonomi*, 2(4), 41–52.
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2010). Public Finance. In M. Marianne L. (Ed.), *National Civic Review* (9th ed., Vol. 76, Issue 3). Douglas Reiner.
<https://doi.org/10.1002/ncr.4100760315>
- Rs, P. H., & Syahputri, A. R. (2013). *Analisis ketimpangan ekonomi dan pengaruhnya terhadap tingkat kriminalitas di propinsi sumatera utara*. 56–76.
- Santosa, S. H. (2015). Disparitas Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi Wilayah di Satuan Wilayah Pembangunan IV Propinsi Jawa Timur. *Media Trend*, 10(2), 116–127.
- Sidik, M., Hidayat, S., & Ridwansyah, M. (2020). Dampak alokasi dana

- perimbangan (DAU , DAK , DBH) terhadap tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi Periode 2010-2019. *Paradigma Ekonomika*, 15(2), 229–238.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Solihin, A., & Lesatri, N. A. (2010). Analisis Ketimpangan Fiskal di Indoneisa Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. *Majalah Ekonomi*, 1, 20–35.
- Sriningsih, S., & Yasin, M. (2009). Dampak Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pemerataan Fiskal Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Barat. *Majalah Ekonomi*, 2, 148–162.
- Sriyana, J. (2011). *Kesenjangan antara Kebutuhan dan Kapasitas Transfer Fiskal di Indonesia*. 32.
- Statistik, B. P. (2020). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2017-2020*. www.bps.go.id
- Sugiarni, N. P. D. E. R., & Supadmi, N. L. (2014). *Pengaruh PAD, DAU, Dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi*. 2(32), 477–495.
- Suyanto. (2017). Kajian Ketimpangan Fiskal (Fiscal Imbalance) Dan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah. *Develop*, 1(1), 1–21.
- Syahrial, Hakim, D. B., & Purnamadewi, Y. L. (2015). Disparitas Regional Provinsi Sumatera Barat. *Tata Loka*, 53–63.
- The World Bank. (2010). *Laporan Penelitian Dana Transfer Pusat ke Daerah*. 4–76.
<http://documents.worldbank.org/curated/en/640961468038947914/pdf/687640ESW0P1190sfer0Pusat0ke0Daerah.pdf>
- Tipka, J. (2014). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kecamatan Di Kota Ambon. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 8(2), 41–45.
<https://doi.org/10.30598/barekengvol8iss2pp41-45>
- Todaro, P. M., & Smith, C. S. (2011). *Pembangunan Ekonomi. Jilid 1* (Edisi 11). Erlangga.

Wahyuningsih, T. (2020). *Ekonomi Publik* (Monalisa (ed.); 2nd ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Wardhana, A., Juanda, B., Siregar, H., & Wibowo, K. (2013). Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 15(2), 111–118.

Wiyekti, N., & Qibthiyyah, R. M. (2021). Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konversi di Indonesia. *Jurnal Manajeman Keuangan Publik*, 5(1), 29–53.

Yoda, T. C., & Febriani, R. (2019). Analisis Ketimpangan Kemandirian Keuangan Daerah di Sumatera Barat. *Menara Ekonomi*, V(3), 121–132.